



LAPORAN KINERJA
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDAPROVSU
TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I
PENDAHULUAN

A. Umum

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal yang terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2011 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, bahwa Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas : Membantu Menyusun Konsep Kebijakan Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pembinaan Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi, Koordinasi dan Pengendalian Urusan Pemerintahan dan atau Kewenangan Otonomi Provinsi dibidang Administrasi Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan, Bina Usaha Jasa dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan.

Fungsi : a. Menyiapkan dan Mengkoordinasikan konsep kebijakan Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pembinaan, Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi, Koordinasi Kebijakan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan, Usaha Jasa dan Evaluasi Pelaporan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan.
b. Menyelenggarakan Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi, Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang Pelaporan, Usaha Jasa dan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah.

Sampai dengan tahun 2016, Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 65 Tahun 2011 tentang tugas, fungsi dan uraian tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakkan disiplin kepada staf lingkup Biro Administrasi Pembangunan;
2. Menyelenggarakan penetapan perencanaan dan program kegiatan Biro, sesuai ketentuan yang ditetapkan;
3. Menyelenggarakan penetapan data/bahan dalam bidang administrasi pembangunan;
4. Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dibidang evaluasi pembangunan, bina usaha jasa dan pengendalian pelaksanaan pembangunan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
5. Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, kebijakan dan pengendalian dibidang evaluasi pembangunan, bina usaha jasa dan pengendalian, pelaksanaan pembangunan
6. Menyelenggarakan bahan untuk penyusunan dan penyempurnaan kebijakan, standar, norma dan kriteria penyelenggaraan evaluasi pembangunan, bina usaha jasa, dan pengendalian pelaksanaan pembangunan;
7. Menyelenggarakan pembinaan dan penataan administrasi/ penatausahaan Biro
8. Menyelenggarakan perumusan penyelenggaraan konsultasi dan asistensi dibidang administrasi pembangunan;
9. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan perumusan penyelenggaraan administrasi pembangunan;
10. Menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan administrasi pembangunan daerah, sesuai standar yang ditetapkan;
11. Menyelenggarakan fasilitasi penyusunan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan anggaran pembangunan belanja daerah, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Menyelenggarakan pengkoordinasian penyelenggaraan pelaporan pelaksanaan administrasi pembangunan
13. Menyelenggarakan perumusan usulan penetapan pejabat pelaksana pengelola kegiatan dibidang anggaran pendapatan belanja daerah, sesuai ketentuan Perundang-Undangan;
14. Menyelenggarakan perumusan penetapan laporan penyelenggaraan administrasi pembangunan, LAKIP, LKPJ dan LPPD Biro, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
15. Menyelenggarakan hubungan kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan administrasi pembangunan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi vertikal/terkait, lembaga dan Kabupaten/Kota, sesuai standar yang ditetapkan;
16. Menyelenggarakan rapat internal dan eksternal penyelenggaraan administrasi pembangunan;
17. Menyelenggarakan analisa dan pengkajian penyelenggaraan pengelolaan administrasi pembangunan;

18. Menyelenggarakan pengkoordinasian penetapan tim penyelenggara pengelola administrasi pembangunan;
19. Menyelenggarakan perumusan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
20. Menyelenggarakan pemberian masukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
21. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Daerah Provinsi, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
22. Menyelenggarakan perumusan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

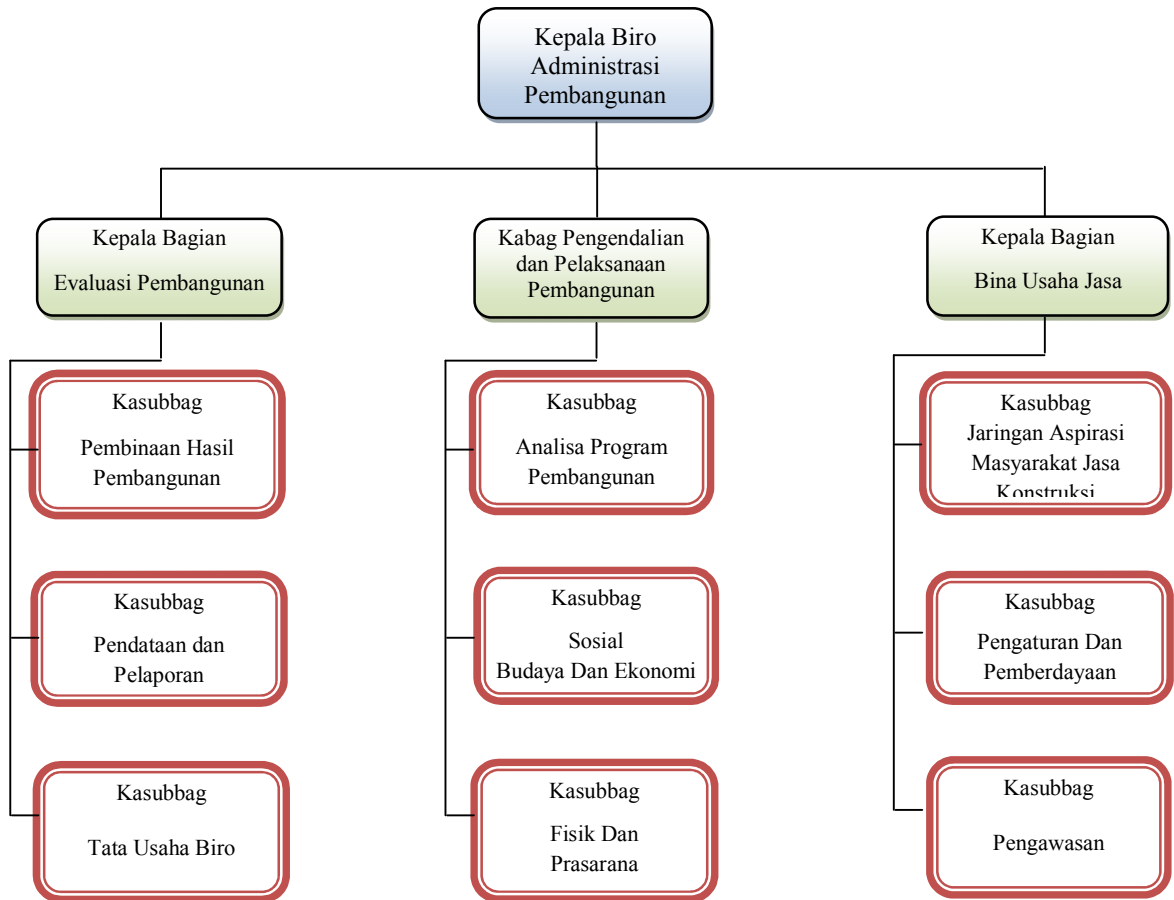
Untuk melaksanakan tugas fungsi dan uraian tugas diatas, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu sampai dengan tahun 2016 ini dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Bagian dengan tugas fungsi sebagai berikut :

1. Bagian Evaluasi Pembangunan
 - 1.1. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 1.2. Sub Bagian Pembinaan Hasil Pembangunan;
 - 1.3. Sub Bagian Pendataan dan Evaluasi.

2. Bagian Bina Usaha Jasa
 - 2.1. Sub Bagian Pengaturan dan Pemberdayaan
 - 2.2. Sub Bagian Pengawasan
 - 2.3. Sub Bagian Jaringan Aspirasi Masyarakat Jasa Konstruksi

3. Bagian Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan
 - 3.1. Sub Bagian Analisa Program Pembangunan
 - 3.2. Sub Bagian Sosial Budaya dan Ekonomi
 - 3.3. Sub Bagian Fisik dan Prasarana

Struktur Organisasi Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu Tahun Anggaran 2016



DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN GOLONGAN

UNIT KERJA : BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDAPROVSU

KEADAAN : Per 30 Desember 2016

I. JUMLAH PNS BERDASARKAN JENIS KELAMIN

1. Laki-laki.....	=	21	Orang
2. Perempuan.....	=	14	Orang
JUMLAH.....	=	35	Orang

II. JUMLAH PNS BERDASARKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar (SD)	=	2	Orang
2. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	=	-	Orang
3. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	=	6	Orang
4. Sarjana Muda (SM)/ D-3	=	1	Orang
5. Sarjana (S-1)	=	22	Orang
6. Pasca Sarjana (S-2)	=	3	Orang
7. Doktoral (S-3)	=	1	Orang
JUMLAH.....	=	35	Orang

III. JUMLAH PNS BERDASARKAN GOLONGAN/ RUANG

NO	GOLONGAN/RUANG	JUMLAH PNS DAERAH PROVINSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	IV/A	1	-
2	IV/B	2	-
3	IV/C	-	-
4	IV/D	1	-
5	IV/E	-	-
JUMLAH		4	-
6	III/A	2	-
7	III/B	9	-
8	III/C	9	-
9	III/D	8	-
JUMLAH		28	-
10	II/A	2	-
11	II/B	-	-
12	II/C	-	-
13	II/D	-	-
JUMLAH		2	-
14	I/A	-	-
15	I/B	-	-
16	I/C	1	-
17	I/D	-	-
JUMLAH		1	-
JUMLAH KESELURUHAN		35	-

B. Landasan Hukum

Dasar-Dasar dalam pelaksanaan Laporan Kinerja yang terikat pada Kontrak Kinerja TA. 2016 Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU adalah :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bebas KKN
3. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah.
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Instruksi Presiden No. 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 Nomor 5);

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU haruslah didukung oleh kekuatan berbagai sumber daya yang ada, namun sampai saat ini Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU masih memiliki seperti jumlah staf yang kurang memadai termasuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas masih minim.

Strategic issued (permasalahan utama) yang sampai saat ini terjadi adalah:

- a. Dalam rangka mengkoordinir dan memfasilitasi instansi terkait PemprovSU dan mitra binaannya dalam mengikuti pameran-pameran hasil pembangunan, kuantitas dan kualitas barang pameran dari SKPD dan mitra binaan perlu ditingkatkan.

- b. Masih kurang seriusnya SKPD dalam memberikan laporan bulanan tentang penataan sistem pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD
- c. Belum maksimalnya tertib administrasi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD dan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provsu
- d. Sistem pelaporan bulanan dengan menggunakan sistem pelaporan berbasis Informasi dan Teknologi (IT) sehingga koordinasi dapat terlaksanakan dengan cepat dan transparansi.

Sejalan dengan hal tersebut, sebagaimana telah diterbitkannya Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan telah diundangkan menjadi Petunjuk Teknis dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan menyusul Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor: 061/095/2016 tanggal 12 Januari 2016 hal Penyampaian LK Tahun 2015 dan PK SKPD Tahun 2016, bahwa sebutan untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) menjadi Laporan Kinerja (LK); sementara itu sebutan untuk Dokumen Penetapan Kinerja (TAPKIN) menjadi Perjanjian Kinerja (LK).

Pada Pasal 4 Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tersebut, antara lain dijelaskan bahwa Permen PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, maka dengan demikian untuk penyusunan Laporan Kinerja (LK) dan Perjanjian Kinerja (PK) pada masing-masing SKPD Pemerintah setiap tahunnya agar mempedomani Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 dimaksud.

Sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN
2. BAB II PERENCANAAN KINERJA
3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
 - A. Capaian Kinerja Organisasi
 - B. Realisasi Anggaran
4. BAB IV PENUTUP
5. LAMPIRAN-LAMPIRAN
 - Perjanjian Kinerja (Tapkin 2016)



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU merupakan gambaran Program dan Kegiatan yang dapat dan harus dikerjakan Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU sesuai dengan Tugas dan Fungsinya berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 65 Tahun 2011 Bab 2 Bagian Kesebelas yang menyatakan bahwa Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU membantu SekdaprovSU dalam Menyusun Konsep Kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan atas pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan evaluasi pembangunan, bina usaha jasa dan pengendalian pelaksanaan pembangunan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, kebijakan dan pengendalian pelaksanaan Pembangunan, usaha jasa dan pengendalian pelaporan administrasi Pembangunan;
2. Penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang pelaporan, usaha jasa dan pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU berpegang pada budaya kerja seperti:

1. Mengutamakan ketelitian, kecermatan, kearifan dan objektivitas dalam bekerja;
2. Mengutamakan disiplin dan waktu;
3. Berusaha bekerja dalam satuan Tim secara efisien, produktif, adaptif dan inovatif;
4. Berorientasi kepada hasil kerja yang prima;
5. Hemat dalam penggunaan dana, sarana dan prasarana;
6. Siap bekerja secara berkualitas.

Untuk menggambarkan identitas masa depan yang didambakan, maka dirumuskan visi dan misi Biro Administrasi Pembangunan sebagai berikut:

1. Visi Biro Administrasi Pembangunan adalah “Terwujudnya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel”

2. Misi Biro Administrasi Pembangunan adalah :
 - a. Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan yang Akuntabel dan Transparan melalui koordinasi dengan lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah.
 - b. Mewujudkan Koordinasi dengan Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan menginformasikan serta mempromosikan hasil-hasil pembangunan daerah di dalam maupun luar negeri sebagai upaya pembinaannya.

Berdasarkan visi dan misi tersebut di atas, Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan koordinasi dalam rangka Pembinaan, Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan dan Hasil-Hasil Pembangunan antar lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah.
2. Mewujudkan tertib administrasi dan mekanisme pelaksanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan tujuan tersebut di atas, ditetapkan sasaran strategis yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan pada point 1 tersebut di atas adalah mewujudkan tertib administrasi dan mekanisme pelaksanaan pembangunan daerah dengan indikator sasaran:

- 1.1. Terkoordinirnya dan Terfasilitasinya Instansi terkait Pemprovsu dan mitra binaannya dalam mengikuti pameran-pameran hasil pembangunan serta potensi daerah Sumatera Utara di Dalam dan Luar Negeri
- 1.2. Terhimpun dan Terevaluasinya Laporan Bulanan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provsu
 - 2.1 Tertibnya Administrasi Pelaksanaan Kegiatan APBD Provsu
 - 2.2 Terlaksananya proses pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Sasaran strategis yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas adalah meningkatkan koordinasi dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan antara lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah dengan Indikator Sasaran:

- 1.1.1. Terkoordinirnya Lembaga-lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah dalam mengikuti pelaksanaan Pameran di dalam maupun di luar negeri yang meliputi Pameran, Hasil Pembangunan, Industri, Perdagangan, Kerajinan, Pariwisata, Budaya, Pertanian/Agro serta Potensi Investasi.
- 1.1.2. Terfasilitasinya Instansi terkait Pemprovsu dan mitra binaannya dalam mengikuti pameran-pameran hasil pembangunan

- 2.1.1. Adanya peningkatan pemahaman jasa penyedia Barang/Jasa.
- 2.1.2. Adanya kelancaran pelaksanaan proses tender pada Dinas/Instansi Pemprov.
- 3.2.1. Adanya operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Regional Sumut
- 3.2.2. Terlaksananya proses pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov su menetapkan kebijakan sebagai berikut :

- a. Memantapkan pelaksanaan tata kerja dan prosedur kerja yang berorientasi kepada efisien dan efektifitas.
- b. Mendorong timbulnya prakarsa masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan melalui pola partisipasi dan berkelanjutan.
- c. Melaksanakan pengawasan secara berjenjang dan mengevaluasi hasil pengawasan tersebut.

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis program/kegiatan sebagaimana telah diatur atau ditetapkan pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 65 Tahun 2011, dimana sasaran strategis Biro Administrasi Pembangunan yang dikelola pada tahun 2016 terdiri dari:

1. Terkoordinirnya dan Terfasilitasinya Instansi terkait Pemprov dan Mitra Binaannya dalam mengikuti Pameran-pameran hasil pembangunan serta potensi Daerah Sumatera Utara di Dalam dan Luar Negeri;
2. Terlaksananya tertib administrasi pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD Provsu;
3. Terlaksananya tertib administrasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan APBD Provsu;
4. Terlaksananya Tertib Administrasi Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD dan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provsu;
5. Terwujudnya tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara Elektronik.

Program Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov su sesuai dengan Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Sumatera Utara pada RPJMD 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- f. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

B. Penetapan Kinerja Tahun 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			Volume	Satuan
1	Terkoordinirnya dan Terfasilitasinya Instansi terkait Pemprov dan mitra binaannya dalam mengikuti pameran-pameran hasil pembangunan serta potensi daerah Sumatera Utara di Dalam dan Luar Negeri.	Terinformasikannya hasil-hasil pembangunan dan potensi Sumatera Utara di dalam dan luar negeri:	13	Pameran
		<ul style="list-style-type: none"> - Frekuensi pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/instansi terkait untuk mengikuti pameran tentang hasil-hasil pembangunan dan potensi Sumut di dalam dan luar negeri - Jumlah SKPD/ Instansi dan mitra binaan (peserta) dalam setahun yang difasilitasi untuk mengikuti seluruh pameran tentang hasil-hasil pembangunan dan potensi Sumut di dalam dan luar negeri 	155	peserta
2	Terlaksananya tertib administrasi pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD Provsu	Terhimpun dan Terevaluasinya laporan bulanan pelaksanaan kegiatan APBD Provsu:	3	Buku
		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah buku laporan - Frekuensi Pelaporan 	12	Kali
3	Terlaksananya tertib administrasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan APBD Provsu	Terlaksananya tertib administrasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan APBD Provsu:	25	Kab Kota
<ul style="list-style-type: none"> - Pendataan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan Kegiatan APBD Provsu pada UPT 	8			
4	Terlaksananya tertib administrasi penyusunan DPA SKPD dan pelaksanaan kegiatan APBD Provsu	Terwujudnya tertib administrasi penyusunan dan penyampaian DPA dan pelaksanaan kegiatan APBD Provsu	53	SKPD
<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah SKPD yang menyampaikan DPA tepat waktu 				

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Administrasi Perkantoran	: Rp. 214.680.000,-	-
2. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	: Rp. 1.985.320.000,-	-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2016 yang memuat realisasi kinerja dan capaian strategis kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan tahun 2016. Selain itu, realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja tahun 2016 disajikan juga dalam Bab ini.

A. Capaian Kinerja

Sebagaimana yang telah diperjanjikan pada Kontrak Kinerja yang telah ditandatangani antara Gubernur Sumatera Utara dengan Kepala Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja masing-masing SKPD Tahun 2016, maka program/kegiatan strategis Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU Tahun Anggaran 2016 yang telah terjadwal dan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

Tabel. Capaian Kinerja Strategis

Program	Kegiatan	Capaian Volume Kegiatan	Permasalahan	Solusi
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait PemprovSU beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitasi Paviliun PemprovSU mengikuti Pekan Raya Sum. Utara	1 Kali Pameran	Kondisi gedung Paviliun PemprovSU kurang baik karena beberapa plafon ada yang rusak begitu juga dengan partisinay sudah kurang layak.	Perlu adanya perbaikan plafon sehingga gedung Paviliun PemprovSU lebih kondusif dan layak dipergunakan untuk promosi
	Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait PemprovSU beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitasi Paviliun PemprovSU mengikuti Pesta P.Pinang/Malaysia	1 kali pameran	Persiapan kurang maksimal, kondisi sarana interior Paviliun perlu dibenahi dan diremajakan, selain itu tahun ini partisipasi yang mengisi paviliun masih rendah	Ditahun mendatang dapat ditingkatkan dan anggarannya pada APBD
	Pembinaan dan Dukungan kepada Dekranasda dan Instansi Terkait PemprovSU dalam mengikuti Expo atau gelar Produk Kerajinan Nasional dan Potensi Lainnya melalui Stand PemprovSU didalam dan Luar Negeri	6 pameran	Belum maksimalnya hasil atau potensi Sumatera Utara yang dapat diinformasikan, mengingat kegiatan ini belum dapat diikuti oleh beberapa Instansi yang seharusnya dapat/ layak untuk mengikutinya	Perlu ditingkatkannya koordinasi antar instansi dilingkungan PemprovSU tentang Keikutsertaan dalam Kegiatan-kegiatan ini

	Penataan Sistem Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD Provsu	1 TA 3 Buku PerBulan	1. Penyampaian Laporan bulanan selalu terlambat, diakibatkan pengelola kegiatan tidak tepat waktu menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan APBD Provsu setiap bulannya 2. Tidak adanya sanksi kepada SKPD yang terlambat dan tidak menyampaikan Laporan Bulanan Kegiatan APBD Provsu	Perlu ditingkatkan fasilitas sistem pelaporan bulanan dengan menggunakan sistem pelaporan berbasis Informasi dan Teknologi (IT) sehingga koordinasi dapat terlaksana dengan cepat dan transparans.
	Pengorganisasian dan Pengkoordinasian Instansi Terkait Pemprovsu beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitasi Paviliun Pemprovsu mengikuti Pekan Raya Jakarta	1 Kali Pameran	Bahan/ Barang Pameran yang ditampilkan dalam stand terlalu padat, sehingga mengurangi keindahan stand dan kerapian penampilan stand	- Perlu dilakukan penambahan luas stand - Perlu dilakukan pengaturan jumlah bahan/barang pameran sehingga ideal untuk ditampilkan.
	Pengendalian Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara	1 TA 25 Kab/8 Kota	Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring, karena keterbatasan dana maka masih belum menjangkau seluruh satuan kerja pemakai dana APBD Provsu, yang mengakibatkan tidak semua permasalahan dan pelaksanaan kegiatan yang ditampung dapat dipantau	Perlu penambahan penganggaran untuk kegiatan, agar seluruh SKPD pemakai dana APBD Provsu dapat dipantau dan dimonitoring.

B. Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2014, Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu mempunyai anggaran APBD sebesar Rp.2.512.591.950,- terdiri dari 2 Program, yaitu Program Administrasi Perkantoran sebesar Rp.227.040.000,- dan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 2.285.551.950,- . Sementara pada Tahun Anggaran 2015, dan Tahun Anggaran 2016 besaran anggaran realisasi sesuai dengan tabel berikut:

Tabel Anggaran Biro TA. 2014

NO	Program	APBD TA. 2014 (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
1	Program Administrasi Perkantoran	227.040.000,-	210.355.950,-
2	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	2.285.551.950,-	2.136.288.200,-
	JUMLAH	2.512.591.950,-	2.346.644.200,-

Tabel Anggaran Biro TA. 2015

NO	Program	APBD TA. 2015 (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	%
1	Program Administrasi Perkantoran	218.760.000,-	184.607.550,-	84,4%
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-
3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagan Pemerintah Daerah	1.991.792.000,-	1.655.174.180,-	83,1%
	JUMLAH	2.210.552.000,-	1.839.781.730,-	83,2%

Tabel Anggaran Biro TA. 2016

NO	Program	APBD TA. 2015 (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	%
1	Program Administrasi Perkantoran	214.680.000	208.992.050	97,40
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-
5	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagan Pemerintah Daerah	1.985.320.000	1.784.888.478	89,90
	JUMLAH	2.200.000.000	1.996.797.481	91,87

APBD Tahun Anggaran 2016 Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu untuk Belanja Langsung diberikan Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) dari Renja TA. 2016 yang diusulkan sebesar Rp. 4.408.000.000,- (empat milyar empat ratus delapan juta rupiah). Jika kita melihat capaian target kinerja dan penyerapan dana program/kegiatan TA. 2015 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Triwulan IV adalah sebagai berikut :

Tabel. Realisasi Anggaran Sasaran Program dan Kegiatan Strategis TA 2015

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	DANA	REALISASI		KET.
		Rp.	Rp.	%	
Program : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah					
1.	Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait Pemprovsumu beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitasi Paviliun Pemprovsumu mengikuti Pekan Raya Sumatera Utara	141.710.000	139.027.200	98,1	
2.	Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait Pemprovsumu beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitasi Paviliun Pemprovsumu mengikuti Sumatera Expo di Batam	60.000.000	54.488.000	90,8	
3.	Pembinaan dan Dukungan kepada Dekranasda dan Instansi Terkait Pemprovsumu dalam mengikuti Expo atau gelar Produk Kerajinan Nasional dan Potensi Lainnya melalui Stand Pemprovsumu didalam dan Luar Negeri	283.439.750	241.571.050	85,2	
4.	Pengorganisasian dan Pengkoordinasian Instansi Terkait Pemprovsumu beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitasi Paviliun Pemprovsumu mengikuti Pekan Raya Jakarta	201.000.000	194.341.500	96,7	
5.	Penataan Sistem Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD Provsumu	97.500.000	82.902.100	85,0	
6.	Pengendalian Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara	139.083.800	121.069.500	87,0	
7.	Biaya Koneksi Internet LPSE Prov. Sumatera Utara	366.224.500	362.288.840	98,9	
8.	Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Regional Sumatera Utara.	165.652.000	157.000.090	94,8	
9.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Sumatera Utara	5.270.000	-	-	

Tabel. Realisasi Anggaran Sasaran Program dan Kegiatan Strategis TA 2016

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	(%)
		(Rp)	(Rp)	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH	1.985.320.000	1.784.888.478	89,90
1	Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait Pemprovsu beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitasi Paviliun Pemprovsu mengikuti Pekan Raya Sum. Utara	150.000.000	144.268.528	96,18
2	Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait Pemprovsu beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitasi Paviliun Pemprovsu mengikuti Pesta Pulau Penang	135.000.000	122.963.553	91,00
3	Pembinaan dan Dukungan kepada Dekranasda dan Instansi Terkait Pemprovsu dalam mengikuti Expo atau gelar Produk Kerajinan Nasional dan Potensi Lainnya melalui Stand Pemprovsu di dalam dan Luar Negeri	260.000.000	258.133.000	99,30
4	Pengorganisasian dan Pengkoordinasian Instansi Terkait Pemprovsu beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitasi Paviliun Pemprovsu mengikuti Pecn Raya Jakarta	266.760.000	247.417.300	92,74
5	Penataan Sistem Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD Provsu	118.000.000	109.144.450	92,49
6	Pengkoordiniran dan Pelaporan Aktivitas Pengadaan APBD Provsu dan APBD Kab/Kota (TEPPA-UKP4) se-Sumut	46.000.000	35.756.200	77,70
7	Pengendalian Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara	215.100.000	209.573.700	97,40
8	Penyusunan Petunjuk Teknis Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara	32.100.000	30.700.000	98,64
9	Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Provsu	150.600.000	139.827.100	92,80
10	Pemberdayaan Tim Pembinaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Kab/ Kota Se- Sumatera Utara	217.000.000	184.115.700	84,40



BAB IV

PENUTUP

Dari hasil realisasi dan analisis kinerja kegiatan serta analisis pencapaian sasaran dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU tahun 2016 baik dilihat dari segi pencapaian kinerja kegiatan maupun pencapaian sasaran cukup berhasil dilaksanakan, karena masing-masing kegiatan telah terlaksana sesuai dengan yang diprogramkan dan telah mencapai sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Secara umum pula dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja telah tercapai sesuai target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2016 dan target jangka menengah.

Dalam proses pencapaian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU pada umumnya tidak ada mengalami kendala tetapi untuk kedepan diharapkan seluruh aparatur Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU dituntut harus lebih tegas dan profesional dalam melaksanakan tugas-tugas sehingga Visi Misi tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan hasil yang memuaskan.

Langkah-langkah ke depan untuk peningkatan kinerja tahun 2017, disamping pembinaan dan untuk peningkatan nilai akuntabilitas kinerja, juga diarahkan untuk:

- Mendorong kepedulian unit kerja dalam menindaklanjuti hasil laporan kinerja
- Mendorong aparatur sipil negara di lingkungan Biro untuk mengikuti bimbingan teknis maupun Diklat-diklat untuk peningkatan kualitas aparatur dan manajemen kinerja guna mencapai peningkatan kinerja tahun 2017 mendatang, baik didukung dengan anggaran yang bersumber dari DPA yang dianggarkan dalam program dan kegiatan.
- Pemberian motivasi kepada para staf untuk meningkatkan kemauan, kesungguhan, kemampuan dan ketrampilannya
- Perbaiki sarana dan prasarana Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU

Akhirnya dengan harapan demikian diharapkan kinerja Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU akan dapat ditingkatkan seiring harapan tertingkatnya anggaran Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU pada APBD di masa mendatang.

-oOo-

**BIRO ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN SETDAPROPSU**

DAFTAR ISI

BAB I	: PENDAHULUAN	1
BAB II	: PERENCANAAN KINERJA	8
BAB III	: AKUNTABILITAS KINERJA	12
	A. CAPAIAN KINERJA	12
	B. REALISASI ANGGARAN	13
BAB IV	: PENUTUP	17

LAMPIRAN :

1. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016
2. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015